

## BAB II

### *All for Norway* dalam Sejarah Norwegia

Norwegia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Nordik atau Skandinavia. Negara ini berbentuk monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. *All for Norway* merupakan motto atau semboyan yang dimiliki oleh kerajaan Norwegia dan telah digunakan sejak kepemimpinan Raja Haakon VII sehingga tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Norwegia. Bab ini menjelaskan mengenai *All for Norway* dalam sejarah keberlangsungan negara Norwegia. Bab ini terdiri atas tiga bagian yaitu: 1) sejarah Nordik, 2) sejarah Norwegia dan 3) motto *All for Norway*.

#### 2.1. Sejarah Nordik

*Nordic* atau *Norden* yang secara harafiah memiliki arti yaitu utara, merupakan wilayah geografis yang terletak di bagian utara Eropa dan Atlantik Utara. Negara-negara yang tergabung dalam wilayah ini antara lain Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, Kepulauan Faroe, Greenland, dan Åland (Kronvall, 2022). Istilah *Nordic* seringkali digunakan untuk merujuk negara-negara Skandinavia atau negara yang berada di kawasan semenanjung Eropa Utara dan menjadi inti geografis negara *Nordic*. Namun, Skandinavia hanya mencakup tiga negara yaitu Norwegia, Denmark dan Swedia (Zeidan, 2023)

Negara-negara *Nordic* memiliki beberapa kesamaan dalam cara hidup, sejarah, agama serta struktur sosial yang dimiliki. Walaupun terdapat kesamaan sejarah yang panjang dalam aspek politik, tetapi negara-negara tersebut tidak memiliki suatu entitas tunggal yang mencakupnya. Terdapat suatu gerakan

bernama “*The Scandinavian Movement*” yang berusaha untuk menyatukan Denmark, Norwegia dan Swedia untuk menjadi suatu kesatuan pada abad ke-19. Gerakan ini berkembang menjadi sebuah bentuk kerjasama yang terorganisir secara modern setelah kemerdekaan negara-negara seperti Norwegia, Finlandia serta Islandia. Pada tahun 1962, terdapat perjanjian yang mendasari kerjasama antar negara-negara di kawasan Nordik yaitu Perjanjian Helsinki. Dalam perjanjian ini terdapat penetapan kerangka kerja untuk Dewan Nordik dan Dewan Menteri Nordik (Kronvall, 2022). Negara-negara Nordik memiliki metrik kinerja nasional yang bagus dalam berbagai aspek seperti pendidikan, daya saing ekonomi, kebebasan sipil, kualitas hidup serta pembangunan manusia. Walaupun terdapat kesamaan di antara negara-negara Nordik, tetapi setiap negara tetap memiliki model ekonomi dan sosialnya masing-masing. Hal inilah yang menjadi faktor pembeda antar negara Nordik (Munch Haagensen, 2013)

Sejarah munculnya negara Nordik dimulai pada masa Viking. Pada tahun 1002, seseorang bernama Leif Erikson yang memiliki julukan “The Fortunate” melakukan pelayaran dari pantai barat Greenland dan menjadi titik awal munculnya Nordik. Erikson menjadi simbol Wilayah Nordik. Ia lahir di Islandia, besar di Greenland dan menghabiskan masa mudanya di Norwegia. Tahun 1003, ia mendarat di Vinland atau yang sekarang dikenal dengan *Newfoundland*. Hal inilah yang membuatnya menjadi orang Eropa pertama yang mencapai pantai Amerika, jauh sebelum Christopher Colombus (Nordic Council, 2021). Pada masa Erikson pula, sebagian besar Wilayah Nordic menjadi sebuah kesatuan kerajaan untuk pertama kalinya yang selanjutnya disebut Wilayah Norwegia. Secara

bertahap, raja-raja Norwegia menguasai Kepulauan Faroe, Islandia dan Greenland serta menjalin relasi dengan raja-raja Viking yang berada di Swedia dan Denmark. Walaupun bangsa Viking memiliki citra sebagai bangsa yang menyukai kekerasan, konflik dan haus darah, tetapi sebenarnya mereka juga memiliki sisi baik. Hal ini dapat terlihat dari keseharian mereka yang menjadi pelaut, pedagang, dan petani yang memelihara ternak serta tanah mereka dengan baik. Melalui cara tersebut para Viking menciptakan modernitas di Wilayah Nordik. Selain itu, masuknya agama Kristen juga menjadi salah satu tanda modernisasi yang dilakukan oleh bangsa Viking serta mempererat relasi kebudayaan dengan Eropa (Nordic Council, 2021).

Posisi Nordik sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik mulai mengalami pengukuhan pada abad pertengahan. Denmark, Norwegia dan Swedia mulai membentuk sebuah persatuan yang bernama *Kalmar Union*. *Kalmar Union* merupakan sebuah persatuan yang dibentuk pada tahun 1397 dan menyatukan tiga negara yaitu Denmark, Norwegia dan Swedia di bawah satu monarki. Pada awalnya *Kalmar Union* dibentuk sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ancaman Jerman yang melakukan perluasan wilayah serta menguasai rute perdagangan di Laut Utara dan Laut Baltik (Andrew McKay, 2019). Peta wilayah *Kalmar Union* mirip dengan peta wilayah Nordik saat ini. Persatuan antara negara-negara Nordik tergolong relatif kuat pada tahun awal. Akan tetapi, ikatan tersebut mulai melemah secara bertahap karena banyaknya perselisihan internal, khususnya antara Denmark dan Norwegia serta Finlandia dan Swedia. *Kalmar Union* akhirnya mengalami perpecahan akibat banyaknya kerusuhan serta

pertumpahan darah di Stockholm pada tahun 1520. Hal tersebut terjadi ketika Raja Denmark, Christian II, melakukan eksekusi terhadap sekelompok besar bangsawan dan beberapa tokoh terkemuka sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya atas Swedia. Akhirnya secara resmi *Kalmar Union* dibubarkan pada tahun 1523 (Margaretha Nordquist, 2018). Setelah pembubaran *Kalmar Union*, terdapat beberapa upaya untuk menyatukan kembali persatuan tersebut. Perang Kalmar terjadi pada tahun 1611-1613 menjadi sebuah upaya yang dilakukan oleh Raja Denmark pada saat itu, Kristen IV untuk menyatukan kembali *Kalmar Union*. Namun, perang ini tidak membuahkan hasil yang signifikan dan sejak saat itu tidak ada lagi upaya yang dilakukan untuk menyatukan kembali (Kronvall, 2022).

Pada akhir Abad Pertengahan dan Renaisans, sebagian besar wilayah Nordik tertinggal dari wilayah Eropa lainnya dalam banyak hal, kecuali Swedia. Wilayah Nordik terkesan berdiri di bawah bayang-bayang negara kawasan seperti Spanyol, Portugal, Belanda dan Inggris yang mulai menaklukkan dunia serta memiliki pengaruh yang besar pada pembangunan di Eropa. Negara-negara Nordik tidak dianggap tidak akan memiliki peran yang signifikan. Sebaliknya, negara-negara yang pernah berperang dan mengorbankan satu sama lain akan mendapatkan kendali penuh atas wilayah Nordik (Mark, 2022). Industrialisasi yang mulai masuk pada abad ke-19, membawa dampak signifikan terhadap kehidupan negara-negara di kawasan Nordik. Banyak orang yang terpicat untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, terlebih akibat kemiskinan yang mulai

meluas. Industri berat, pertambangan dan pembuatan kapal mulai muncul di sebagian besar wilayah Nordik (Nordic Council, 2021).

Setelah Perang Dunia I, pembangunan ekonomi mulai berlangsung di seluruh kawasan Nordik. Hal ini tidak terlepas dari bantuan Amerika Serikat melalui Marshall Plan. Kebijakan luar negeri Finlandia yang sebelumnya condong ke Uni Soviet, mulai mendekati diri dengan negara-negara Barat dan negara-negara Nordik lainnya. Untuk menyeimbangkan hubungan dengan kedua kubu tersebut, Finlandia mempertahankan kebijakan netralitas yang tetap mempertahankan hubungan dagang dengan Barat dan Uni Soviet. Sementara Finlandia mempertahankan netralitasnya, negara-negara Nordik lainnya memutuskan bergabung dengan NATO pada tahun 1949. Walaupun negara-negara Nordik terkesan terfragmentasi, tetapi terdapat dukungan yang dapat mendekati negara-negara tersebut secara budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu pada tahun 1952, mulai dibentuk Dewan Nordik. Dasar dari pembentukan Dewan Nordik yaitu kepentingan bersama dalam kebijakan sosial, lingkungan serta fiskal. Wilayah Nordik memiliki tingkat pajak yang tinggi dengan tujuan untuk mendanai jaringan pengamanan sosial (McKay, 2021)

Konsep konstruktivisme berbasis identitas dapat diterapkan dalam perjalanan sejarah negara-negara Nordik. Hal ini dapat terlihat pada aksi yang dilakukan negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swedia, Denmark, Islandia dan Norwegia untuk membantu Ukraina. Konsep konstruktivisme berbasis identitas dapat terlihat dalam identitas Nordic Council sebagai sebuah kesatuan yang memiliki tujuan untuk membangun perdamaian dunia dengan memberikan

bantuan terhadap negara konflik, dalam kasus ini yaitu Ukraina dalam perang Ukraina dan Rusia. Negara Nordik pada tahun 2023 telah mengalokasikan dana sebesar EUR 4,4 miliar yang terdiri atas bantuan militer seperti tank, kendaraan lapis baja, sistem anti-pesawat, artileri serta pelatihan kepada tentara Ukraina. Selain itu, negara-negara Nordik juga mendukung inisiatif Ukraina untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi serta siap ambil bagian dalam upaya mengadili kejahatan perang (Minister, n.d.).

## **2.2. Sejarah Norwegia**

Salah satu negara yang berada di kawasan *Nordic* adalah Norwegia. Norwegia merupakan sebuah negara terletak di kawasan Eropa, tepatnya di Eropa bagian utara. Negara ini juga terletak di bagian paling barat Semenanjung Skandinavia. Norwegia memiliki ibu kota bernama Oslo di mana hampir setengah dari penduduknya bertempat tinggal di sekitarnya atau lebih tepatnya di ujung selatan Norwegia. Sebagian besar wilayah negara ini berada di pegunungan. Total luas wilayah yang dimiliki oleh Norwegia adalah sebesar 385.207 km<sup>2</sup> dan memiliki populasi penduduk sebanyak 5.488.984 jiwa pada tahun 2023. Negara ini berbatasan secara langsung dengan Swedia di sebelah timur, Finlandia dan Rusia di sebelah timur laut, Selat Skagerrak di bagian selatan serta Denmark juga Inggris (Weibull, 2022).

Setiap negara-negara Nordik memiliki keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Negara Nordik tidak hanya mengenai Denmark, Swedia ataupun negara lainnya, tetapi juga Norwegia. Posisi Norwegia dalam dinamika internasional juga perlu diperhatikan. Salah satu alasan mengapa Norwegia dipilih

sebagai topik penelitian ini karena Norwegia merupakan negara penghasil minyak terbesar di Eropa setelah Rusia. Norwegia memiliki cadangan minyak dan gas lepas pantai di Laut Utara yang menjadi salah satu kontributor kemakmuran ekonomi negara dan memberika pendapatan yang besar. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi Norwegia untuk membangun dana kedaulatan atau biasa dikenal dengan *Government Pension Fund Global* yang merupakan salah satu kekayaan negara terbesar di dunia (Hussein, 2018). Selain itu, Norwegia juga menjadi negara donor dengan kontribusi yang cukup besar dalam membantu negara miskin dan berkembang. Melihat dari sudut pandang konstruktivisme berbasis identitas dengan aksi Norwegia tersebut, Norwegia memiliki identitas sebagai sebuah negara donor, khususnya terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia dan Afrika (termasuk Indonesia). Hal ini tentu saja membuktikan bahwa Norwegia berusaha untuk membangun negara miskin dan berkembang untuk menjadi lebih baik dan maju.

Sejarah Norwegia dimulai ketika orang-orang mulai menetap di kawasan tersebut pada tahun 9000 SM atau setelah akhir zaman es. Para penduduk tersebut bertahan hidup dengan melakukan perburuan dan memancing hewan seperti anjing laut, rusa dan paus. Pertanian mulai dikenal pada zaman perunggu atau 500 SM dan ditandai dengan penemuan senjata serta perhiasan. Viking juga menjadi bagian besar sejarah Norwegia yang dimulai pada 800 hingga 1050 M. Selama periode tersebut, para Viking menyerbu berbagai wilayah seperti Irlandia, Perancis, Inggris dan Skotlandia. Penyerbuan tersebut tentu saja memiliki tujuan

yaitu untuk menangkap dan memperdagangkan budak sebagai tenaga kerja di pertanian Norwegia (Nikel, 2019).

Harald Fairhair menjadi tokoh yang memulai proses pemersatu Norwegia saat bersekutu dengan *Earls of Lade*. Selain itu, ia juga menyatukan negara setelah Pertempuran Hafrsfjord. Harald Fairhair juga membuat dasar-dasar administrasi negara dengan para pelayan perkebunan dan kepala suku yang daerahnya sudah ditaklukkan. Selanjutnya pada tahun 930, Håkon the Good, putra Harald Fairhair, mengambil alih kepemimpinan tahta Norwegia. Kepemimpinannya membawa dampak besar, seperti dibentuknya majelis di Norwegia Barat (Gulating) dan Trøndelag (Frostating). Selain itu, juga dibentuk *leindag* atau sebuah organisasi setingkat tentara atau angkatan laut. Haakon juga memperkenalkan agama Kristen di Norwegia, akan tetapi mengalami kegagalan. Setelah kematiannya pada tahun 960, Norwegia pecah menjadi dua dinasti, yaitu Fairhair dan *Earls of Lade* yang beraliansi dengan raja-raja Denmark (Zeidan, 2022).

Zaman Keemasan Norwegia dimulai pada akhir abad ke-13 yang dibuktikan dengan penemuan minyak. Pada masa tersebutlah situasi Norwegia dapat dikatakan damai dan perdagangan internasional berkembang pesat, terutama dengan Inggris dan Jerman melalui Liga Hanseatic yang menguasai perdagangan Bergen. Namun, masa keemasan tersebut tidak berlangsung lama karena munculnya Wabah Hitam yang membunuh sepertiga populasi Norwegia. Tentu saja hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh gereja menjadi semakin kuat (Nikel, 2019; Weibull, 2022).

Pewaris tahta selanjutnya yaitu Olaf Haakonsson, membentuk serikat pekerja yang menjadi awal dari aliansi politik dan perang antar negara Nordik. *Kalmar Union* mulai dibentuk pada tahun 1397 yang menjadi persatuan tiga negara yaitu Norwegia, Denmark dan Swedia. *Kalmar Union* menjadi salah satu contoh penerapan konsep konstruktivisme berbasis identitas karena menunjukkan bentuk pemersatuan tiga negara yang selanjutnya membentuk identitas Nordik. Akan tetapi Margaret I yang memerintah saat itu, menjalankan kebijakan sentralisasi yang lebih menguntungkan Denmark sehingga Norwegia menjadi negara lemah dan sulit untuk keluar dari persekutuan tersebut. Selain itu, Margaret I juga mendorong para pedagang Hanseatic untuk membentuk negara mereka sendiri di dalam kota Bergen yang semakin melemahkan keberadaan Norwegia hingga kemerdekaan Swedia pada 1520an (Nordic Council, 2021).

Selama abad ke-17, terjadi perang antara Denmark dengan Swedia yang memperebutkan teritori. Hal ini membawa dampak bagi Norwegia yang mana keadaan ekonominya meningkat akibat perdagangan kayu. Selain itu juga banyak masyarakat Norwegia yang menjadi pelaut di kapal-kapal asing, terutama kapal Belanda yang mencari kayu. Untuk menghindari penggundulan hutan, Kerajaan Norwegia membuat kebijakan penutupan sejumlah besar pabrik penggergajian. Pendorong utama ekonomi Norwegia pun berubah dari yang awalnya kayu menjadi pertambangan (tambang perak Kongsberg dan tambang tembaga Røros), industri kapal serta perikanan (Nikel, 2019)

Pada tahun 1813, raja muda Norwegia bernama Christian Frederik, memulai pergerakan kemerdekaan Norwegia. Pertemuan majelis nasional diadakan di

Eidsvoll. Namun, alih-alih memilih Frederik menjadi raja, 112 anggota majelis nasional tersebut lebih memilih membentuk konstitusi. Sejak saat itu, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Konstitusi Norwegia. Konstitusi membagu kekuasaan negara menjadi dua, yaitu raja dan badan parlemen. Beberapa minggu setelah penandatanganan konstitusi, Swedia menginvasi Norwegia dan karena adanya permasalahan ekonomi, Norwegia menerima pemerintahan Swedia walaupun konstitusinya masih utuh (McKay, 2021)

Walaupun Norwegia menerapkan kebijakan netralitas, tetapi armada niaga Norwegia mendukung Inggris dalam Perang Dunia I. Pada periode ini, keadaan Norwegia didominasi oleh ketidakstabilan ekonomi akibat dari sukseksi pemerintahan, pemogokkan, *lock out* dan deflasi. Pasukan Nazi Jerman menduduki Norwegia pada Perang Dunia II. Tujuan Jerman menduduki Norwegia adalah untuk menjadikan Norwegia sebagai alat kontrol akses ke Laut Utara dan Atlantik serta untuk dapat menempatkan pasukan udara dan angkatan laut. Pemerintahan Norwegia juga diasingkan dan keluarga kerajaan melarikan diri ke London. Politik pun ditangguhkan dan pemerintah mengkoordinasikan tindakan dengan Sekutu guna mempertahankan kendali atas layanan diplomatik serta konsuler di seluruh dunia. Selain itu juga untuk mengoperasikan kapal niaga Norwegia yang besar. Pemerintah Norwegia berusaha untuk menghambat pendudukan Jerman dengan melakukan sabotase, penggerebekan, operasi kladdestin dan pengumpulan intelijen. Salah satu tindakan Norwegia yang dapat dibilang berhasil adalah melakukan sabotase air. Tindakan ini berhasil melumpuhkan proyek energi nuklir Jerman. Konsekuensi yang harus ditanggung

Norwegia akibat pendudukan Jerman ini dapat dikatakan fatal, terlebih pada bidang ekonomi. Norwegia kehilangan mitra dagang mereka sehingga kegiatan ekspor terhambat. Selain itu, pendudukan Jerman juga menyita komoditas yang dimiliki oleh Norwegia. Keadaan Norwegia sangat mengalami keterbelakangan. Masyarakat Norwegia mengalami penurunan produktivitas yang menyebabkan mereka dihadapkan pada kelangkaan makanan. Hal ini membuat masyarakat beralih ke sektor pertanian dan peternakan. Kebijakan bumi hangus Hitler memberikan dampak jangka panjang di daerah Finnmark karena infrastruktur transportasi dan rumah dibakar sehingga masyarakat harus mengungsi ke pegunungan serta gua-gua (Andrew McKay, 2019).

Tahun-tahun pascaperang, terjadi peningkatan kolaborasi antar negara Nordik, salah satunya adalah pembuatan maskapai Skandinavia (SAS) dan Dewan Nordik. Norwegia memulai negosiasi untuk membentuk serikat pertahanan Skandinavia. Namun, keputusan Norwegia sangat bertolakbelakang dengan ide yang dimiliki dan lebih memilih untuk menjadi anggota NATO. (Weibull, 2022). Penduduk Norwegia menolak keanggotaan Uni Eropa, tetapi negara ini bergabung dengan Wilayah Ekonomi Eropa dan Perjanjian Schengen. Saat ini, Norwegia melakukan investasi besar dalam teknologi hijau, meskipun negara masih mengizinkan eksplorasi dan eksploitasi minyak juga gas secara substansial. Selain itu, Norwegia juga memiliki pasokan energi domestik yang terbarukan sehingga terdapat dorongan elektrifikasi. Subsidi pemerintah telah membawa Norwegia kepada kemajuan seperti penggunaan mobil listrik dan pesawat bertenaga baterai (Nikel, 2019).

### 2.3. *All for Norway*

*Alt for Norge* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *All for Norway* merupakan moto milik kerajaan Norwegia. Moto ini menjadi sebuah hal penting bagi sejarah Norwegia karena telah menyatukan tiga raja modern Norwegia yaitu Raja Haakon VII, Raja Olav V dan Raja Harald V. Selain itu, moto ini juga menjadi seruan untuk bangsa Norwegia. Moto ini mulai diserukan ketika Pangeran Carl dari Denmark dinominasikan sebagai calon raja untuk Norwegia yang baru saja merdeka. Oleh karena itu sebelum naik tahta, Pangeran Carl bersikeras melakukan plebisit atau pemungutan suara agar masyarakat dapat memutuskan apakah mereka ingin negara berbentuk monarki dan mendukung Pangeran Carl sebagai raja. Plebisit tersebut menghasilkan keputusan bahwa masyarakat mendukung monarki dan mendukung Pangeran Carl sebagai raja. Pada 18 November 1905, Pangeran Carl naik tahta dengan nama Raja Haakon VII (Ilse, 2021).

Setelah penobatannya, Raja Haakon VII (1905) memberikan pidato yang menyatakan bahwa Raja Haakon VII ingin mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan Norwegia serta dengan keyakinan penuh mengambil *Alt for Norge* sebagai motonya. Dalam pidatonya ia mengatakan,

*“Landsmenn. Vi føler alle det samme i dag. La oss beholde det samhold som ga oss seier. Og la oss i dette øyeblikk huske dem som ofret det ytterste i kampen for Norge. La oss samle oss i løftet Alt for Norge”*(Gaunghan, 1909)

Sejak saat itu, *Alt for Norge* menjadi moto kerajaan yang menjadi “Kami memberikan segalanya untuk Norwegia”. *Alt for Norge* menjadi suatu ringkasan akan pesan ciri politik Norwegia sepanjang tahun yang mana bangsa di atas

segalanya. *Alt for Norge* juga merepresentasikan perjuangan rakyat Norwegia ketika melawan pendudukan Jerman. Raja Haakon VII menyatakan bahwa moto yang diambil tersebut akan selalu menentukan segala tindakan yang ia ambil dan meyakini bahwa ia akan melayani rakyat dengan baik (Leon, 2011).

Raja Haakon VII menjadi seorang raja populer yang memimpin Norwegia selama Perang Dunia II. Walaupun keluarga kerajaan terpaksa melarikan diri dari negara karena takut akan nyawa mereka, tetapi dia tetap menjadi simbol utama dari keinginan rakyat Norwegia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah meninggalnya Raja Haakon VII, moto kerajaan *Alt for Norge* masih digunakan oleh putranya yaitu Raja Olav yang juga dikenal sebagai *Folkekongen* atau Raja Rakyat karena dedikasinya terhadap kehidupan masyarakat Norwegia. Setelah kematian Raja Olav pada tahun 1991, Raja Harald naik tahta menggantikan posisi ayahnya dan masih mengadopsi moto *Alt for Norge* sebagai simbol kerajaannya (Ilse, 2021). Berikut ini gambar yang menunjukkan penobatan Raja Haakon VII dari Norwegia pada tahun 2005, didampingi oleh Ratu Maud.

**Gambar 2.1** Raja Haakon VII bersama Ratu Maud ketika Dinobatkan menjadi Raja Norwegia pada 1905



Sumber: <https://www.kongehuset.no>

Moto *Alt for Norge* atau *All for Norway* ini semakin populer semenjak pemisahan Norwegia dari Swedia. Hal ini ditandai dengan pajak yang mengalami peningkatan secara pesat sehingga meningkatkan pula kemakmuran negara. Industri di Norwegia juga mengalami kemajuan. Oleh karena itu, moto *Alt for Norge* dituliskan pada koin mata uang milik negara tersebut (Gaunghan, 1909). Berikut merupakan gambar yang menunjukkan moto *All for Norway* pada Krone Norwegia.

**Gambar 2.2** Moto *Alt for Norge* dalam Krone Norwegia



Sumber: <https://www.ngccoin.com>

Apabila dikaitkan dengan konsep konstruktivisme berbasis identitas, penggunaan motto *All for Norway* dalam keberlangsungan negara Norwegia menjadi sebuah identitas dalam menggambarkan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam makna *All for Norway* sendiri merujuk pada upaya untuk mencapai kebebasan dari pendudukan Jerman. Dengan mencapai kebebasan dari pendudukan Jerman, Norwegia memiliki identitas sebagai negara yang bebas dan merdeka sehingga dapat menjalankan kedaulatan negara secara penuh. Bukti dari pengimplementasian moto ketika pendudukan Jerman terhadap Norwegia dapat terlihat dari pidato yang diberikan oleh Raja Haakon VII yang menyatakan bahwa Raja lebih memilih untuk turun tahta apabila Vidkun Quisling selaku Perdana Menteri Norwegia saat itu tetap mempertahankan kerja sama untuk melawan Komunis dan Yahudi. Raja Haakon menganggap hal ini sebagai sebuah pengkhianatan tingkat tinggi:

*“Mitt valgspåk ‘Alt for Norge’ har alltid vært og er fremdeles bestemmende for mine handlinger, og kunne jeg bli overbevist om at jeg i denne stund ville tjene mitt folk best ved å gi avkall på mitt kongelige verv, eller kunne jeg ha sikkerhet for at det bak Stortingets presidentskap i denne sak stod et flertall av det norske folk, ville jeg [...] følge den henstilling, som presidentskapet har rettet til meg” (Leon, 2011)*

Moto *All for Norway* digunakan dasar bahwa tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk melayani kepentingan dalam negeri dan warganya. Hal ini menunjukkan implementasi prinsip kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan bagi bangsa. Moto *All for Norway* juga memiliki arti bahwa keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai manfaat bagi negara, khususnya terhadap aspek sentral seperti ekonomi, sosial dan kesejahteraan. Hal ini tentu saja menyiratkan bahwa kepentingan dalam negeri dan warganya harus didahulukan dalam pembuatan sebuah kebijakan atau regulasi dan alokasi sumber daya.

Pengimplementasian moto *All for Norway* secara tersirat dapat terlihat ketika penerapan diplomasi *soft power* mendapatkan perhatian baru dalam kancah internasional, khususnya awal tahun 1990. Perubahan ini secara langsung memperluas ruang bagi negara-negara kecil dalam hubungan internasional guna membentuk identitas mereka (Stokke, 2012). Identitas negara kecil telah diubah melalui pernyataan Norwegia sebagai aktor utama dalam beberapa sektor tertentu. Norwegia dianggap memiliki kepentingan yang punya pengaruh di berbagai bidang. Perkembangan Norwegia sebagai *humanitarian power* dan *peace nation* menjadi bukti upaya sebuah negara kecil untuk membentuk kedudukan serta

pengaruhnya dalam hubungan internasional guna mencapai kepentingan nasional mereka (Stokke, 2012)

Walaupun pada abad ke-21 ini sebagian penduduk Norwegia lebih menyukai bentuk negara republik, tetapi bentuk negara monarki masih terbilang kuat dengan pengimplementasian moto *All for Norway*. Karakter yang dibangun oleh monarki modern menunjukkan keterbukaan pikiran. Monarki modern Norwegia menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti toleransi; solidaritas ataupun lingkungan hidup (*vil de legge vekt på verdier de selv setter høyt, som toleranse, solidaritet og miljø*, VG 2 April 2001). Terlepas dari hal tersebut, Norwegia telah menjadi monarki yang sukses karena semakin tumbuhnya rasa stabilitas dan kepercayaan yang dibangun oleh pemerintah melalui pengimplementasian moto *All for Norway* (Leon, 2011).

Pada saat ini, pengimplementasian moto *All for Norway* dilakukan secara tersirat. Salah satu hal yang dapat dijadikan contoh yaitu kepentingan yang dibangun oleh Norwegia di Sudan Selatan. Sudan Selatan menjadi negara yang memiliki potensi tak terbatas dalam sektor minyak, gas, pertambangan, dan sumber daya energi yang melimpah sehingga negara tersebut berpeluang sebagai target investasi terbesar dalam sektor energi (South Sudan Embassy in Norway, 2023). Investasi yang dilakukan Norwegia ini sesuai dengan posisi Norwegia sebagai sebuah negara penghasil cadangan energi, secara khusus minyak dan gas alam. Dengan adanya investasi tersebut, Norwegia dapat melebarkan sayap mereka dalam sektor energi di luar wilayah Eropa yang tentu saja juga membawa keuntungan terhadap cadangan energi dalam negeri (South Sudan Embassy in

Norway, 2023). Contoh lain yang dapat diambil mengenai pengimplementasian moto *All for Norway* melalui kerja sama dengan mitra dari pemberian bantuan luar negeri oleh Norwegia yaitu hubungan bilateral dengan Brazil terkait perdagangan dan energi. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Petter Ølberg, selaku Wakil Tetap Norwegia untuk WTO dan EFTA pada 25 November 2022, Brazil sangat berperan dalam perekonomian domestik Norwegia melalui ekspor bahan mentah dan bahan makanan untuk produksi lokal (Olberg, 2022).

Moto *All for Norway* tidak mengabaikan pada kerja sama global atau isolasionalisme. Sebaliknya, moto ini menekankan pada pentingnya memastikan bahwa keputusan serta tindakan harus menguntungkan negara dengan mempertimbangkan dampak potensial terhadap dinamika hubungan internasional dan isu-isu global. Dapat disimpulkan bahwa moto *All for Norway* menggambarkan fokus negara untuk mempromosikan kepentingan dalam negeri dan memastikan kemakmuran serta keamanan jangka panjang dengan menimbang dari keterkaitan dunia dan potensi manfaat kolaborasi dengan negara lain.